
EVALUASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALANGKA RAYA

Evaluation Of Retribution Leading On Regional Original Income (PAD) In Palangka Raya City

Farid Zaky Yopiannor *

Eka Mera A

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

farid.zaky@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengevaluasi Pemungutan Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti lebih pada pengamatan, serta mendeskripsikan fenomena permasalahan yang ada melalui kata-kata, gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu ada Evaluasi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palangka Raya. Baik itu dari input, proses, output dan outcomes. Agar realisasi Retribusi Pasar mencapai target yang diharapkan dan kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar.

Kata Kunci:

Evaluasi
Retribusi
Pasar

Keywords:

Evaluation
Retribution
Market

Accepted

Januari 2015

Published

April 2015

Abstract

This study aims to find out and describe and evaluate the collection of market restitution on PAD in the City of Palangka Raya. This study uses qualitative research methods, where researchers are more on observation, and describe the phenomenon of existing problems through words, images. The results of this study indicate that there needs to be an evaluation of the collection of market levies on regional original income (PAD) in the city of Palangka Raya. Either from the input, process, output, and outcomes. In order for the realization of Market Retribution to reach the expected target and the market contribution to regional original income (PAD) is greater.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mnegurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dnegan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah ini telah menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi yang memberikan harapan yang baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Salah satu untuk melihat tolak ukur kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri.

Sejalan dengan itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi kedaerah dalam jumlah besar. Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya juga menjadikan sektor Retribusi Daerah sebagai slaah satu sumber keuangan yang paling di andalkan. Sektor Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaham dan Perizinan

merupakan sektor yang sangat besar untuk digali untuk diperluas pengelolaannya.

Kontribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Petugas pemungutan retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Semakin tinggi kemampuan pelaksanaan pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat daerah, sehingga petugas pemungutan retribusi diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Dalam hal ini, Dunn (2003:608) menjelaskan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut Sahya Anggara (2014: 271), evaluasi menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

Sedangkan A.S Hornby dalam Herabudin (2016: 153) mengungkapkan bahwa evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya sebagai penilaian atau to find out, beside the amount of value. Selain itu, Menurut Stufflebeam dalam Daryanto (2008:1) Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk alternatif keputusan. Sementara itu Suchman dalam Arikunto (2004:1) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah di capai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Arikunto (2004:10) dua ahli tersebut mengatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan mencari

sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Glosarium (2005:179) Otonomi daerah pungutan adalah penerimaan pemerintah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut KBBI, Pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut (2007:908)

Pengertian Retribusi secara umum pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara Sumitro dalam Kaho (2005:170). Selanjutnya, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting lainnya. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Suparmoko (2002:85)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti lebih pada pengamatan, serta mendeskripsikan fenomena permasalahan yang ada melalui kata-kata, gambar sehingga dapat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang berhubungan dengan masalah atau gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penggalan data menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam dan FGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Retribusi Pasar di Kota Palangka Raya, maka penulis merasa ada beberapa hal yang perlu di evaluasi yaitu meliputi hal-hal seperti dibawah ini :

1. Evaluasi Input

Untuk jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah petugas pemungutan retribusi pasar, perlu ada penambahan petugas pemungutan retribusi pasar dilapangan mengingat jumlah pedagang yang ada di Kota Palangka Raya begitu banyak dan luas Kota Palangka Raya yang begitu luas wilayahnya. Selain itu ada perbaikan sarana dan prasarana pasar yang ada, meskipun selama ini sarana dan prasarana pasar ada sebagian sudah memadai.

Karena sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menarik minat para pedagang untuk berjualan di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga, semakin banyak pedagang yang berjualan ditempat yang di sediakan oleh pemerintah, maka semakin banyak pula jumlah retribusi pasar yang diterima oleh pemerintah, maka semakin banyak pula jumlah retribusi pasar yang diterima oleh pemerintah. Sehingga kontribusi rertribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah semakin besar pula.

2. Evaluasi Proses

Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan pemungutan retribusi pasar masih belum tegas, baik dari segi waktu pemungutan tarif dan sakso. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian dilihat dari segi waktu pemungutan retribusi tidak ada kepastian atau kesepakatan antara pedagang dan pemungut retribusi pasar. Sedangkan jika dilihat dari segi tarif retribusi masih belum tegas. Hal itu dikarenakan retribusi pasar sifatnya tidak mengikat dan untuk besarnya tarif retribusi sedang dan pemungut yang dipungut berdasarkan kesepakatan antar pedagang dan pemungutan retribusi pasar, sehingga jika ada pedagang tidak membayar retribusi pasar atau membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan ketentuan aturan daerah maka pedagang tersebut tidak dikenakan sanksi seperti tertuang dalam peraturan daerah, dan selama ini

belum pernah ada pedagang dikota palangka Raya di kenakan sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

3. Evaluasi output

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pemungutan Retribusi Pasar tersebut, yaitu :

- a. Kesadaran pedagang masih rendah untuk membayar Retribusi
- b. Retribusi daerah sifatnya tidak mengikat
- c. Penarikan atau pemungutan retribusi pasar tidak tepat waktunya, misalnya pada saat pemungutan dilakukan oleh petugas Retribusi ada toko yang masih belum buka
- d. Kurangnya informasi atau data tentang jumlah potensi retribusi pasar (jumlah pedagang) yang ada.

4. Evaluasi Outcomes

Untuk dampak negatifnya karena ada beberapa masalah yang ditemui dalam pemungutan retribusi pasar, sehingga target retribusi pasar tidak pernah tercapai dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah masih kecil.

Sedangkan untuk dampak positif dari kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, melalui retribusi pasar yang mereka bayar.

KESIMPULAN

1. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar dilapangan, terdapat beberapa hambatan. Sehingga perlu adanya evaluasi baik dari input, proses, output, dan outcomes.
2. Adapun hambatan yang ditemui dilapangan pada saat pemungutan retribusi pasar dilihat dari segi inputnya adalah seperti kurangnya jumlah tenaga pemungut retribusi pasar, sarana, prasarana yang sebagian belum memadai. Sedangkan dari process pemungutan retribusi pasar adalah kebijakan

retribusi daerah yang sifatnya tidak mengikat dan ketentuan sanksi bagi pedagang yang tidak membayar retribusi pasar masih tegas dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pedagang tentang wajib membayar retribusi pasar. Sehingga berdampak pada jumlah realisasi retribusi pasar yang tidak pernah mencapai apa yang telah diharapkan atau ditargetkan.

3. Selain jumlah realisasi retribusi pasar yang tidak pernah mencapai target yang diharapkan, akibat lain dari hambatan-hambatan seperti yang dikemukakan di atas adalah kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir.

REFERENSI

- Akdon. 2006. *Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategik untuk manajemen pendidikan)*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Japar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. PT.indeks
- Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herabudin. 2014. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung. Refika Aditama
- Meleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.